

Literasi Masyarakat dan Pengentasan Buta Aksara: Kebijakan Pemerintah dalam Merealisasikan SDGs *Quality Education* di Kabupaten Sumenep

Community Literacy and Illiteracy Eradication: Government Policy in Realizing SDGs Quality Education in Sumenep Regency Wilda Rasaili

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Wiraraja Madura, Indonesia
Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.05 Patean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Diterima: 23 Februari 2021; Direview: 23 Februari 2021; Disetujui: 02 April 2021

*Corresponding Email: wl.rosailiw@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat dan pengentasan buta aksara sebagai bagian dari mempromosikan SDGs bidang kualitas pendidikan. Pengentasan buta huruf di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan pemerintah daerah. Dalam studi ini akan dilakukan penelitian terkait pengentasan buta huruf di kabupaten Sumenep dengan paradigma SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam mengumpulkan dan mengolah data terkait kebijakan pengentasan buta huruf oleh pemerintah di kabupaten Sumenep. Kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep menjadi bagian dasar dalam memajukan masyarakat, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep di bidang pendidikan termasuk di antaranya adalah inisiasi dalam membangun masyarakat melalui program pengentasan buta aksara bagi masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengentasan buta huruf dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumenep agar masyarakat mendapat pendidikan yang berkualitas dengan kemajuan mereka di bidang literasi (membaca dan menulis) dan untuk mendukung masa depan mereka yang dihadapkan pada dunia teknologi yang semakin hari semakin maju, ini menjadi indikator dari kebijakan yang diberlakukan.

Kata Kunci: Pemerintah; Kebijakan; SDGs; Pendidikan

Abstract

This article aims to explain government policies in increasing public literacy and illiteracy as part of promoting SDGs in the field of quality education. A the alleviation of illiteracy in Indonesia has been performed by the central government through the district government policy. In this study will be performed a research about the alleviation of illiteracy in Sumenep district by using paradigm of SDGs (Sustainable Development Goals) in quality educational aspect and skill life education. This research uses descriptive-qualitative method in collecting and analyzing the data about the alleviation of illiteracy policy that is applied by government in Sumenep district. The Sumenep district government policy becomes a basic part in advancing the society, includes the policy in education aspect. One of the Sumenep district's policies in education aspect includes an initiation in convincing the society through the alleviation of illiteracy for poor people. This research gets a conclusion that alleviation of illiteracy was performed by Sumenep district government in order the people get the quality education for their development in literary aspect (reading and writing) and to support their future that is faced to the technology world more advanced and more advanced, this becomes an indicator of prevailed policy.

Keywords: Government; Policy; SDGs; Education.

How to Cite: Rasaili, W. (2021). Literasi Masyarakat dan Pengentasan Buta Aksara: Kebijakan Pemerintah dalam Merealisasikan SDGs Quality Education di Kabupaten Sumenep. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (1): 63-70.



PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Bab III tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional. Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Negara beserta aparat pemerintahan memiliki tugas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana umumnya, langkah ini dilakukan dengan program pendidikan nasional. Mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah (kabupaten) harus memberikan sarana dan program wajib belajar agar pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan. Komitmen politik dan kebijakan pemerintah daerah juga mendorong pada realisasi program pembangunan kualitas pendidikan berkelanjutan (Rasaili et al., 2020). Selain itu kesadaran masyarakat juga menjadi penunjang bagi keberhasilan pendidikan berkelanjutan pada bidang pengentasan buta aksara.

Pemerintah kabupaten Sumenep telah melakukan terobosan dalam bidang pendidikan, yaitu pengentasan buta aksara bagi – secara khusus – masyarakat (dewasa) kurang mampu di pelosok desa (kondisi ekonominya menengah ke bawah). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah kabupaten Sumenep bisa memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan bagi warganya. Langkah sejenis ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena memerlukan dukungan masyarakat dan ketersediaan dana yang menjadi penopang utamanya sebagai penentu keberhasilan program pemerintah selain memang kesiapan masyarakat untuk belajar.

Dalam strategi pembangunan, program ini merupakan langkah yang sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda SDGs global memastikan dapat memandu pemerintah melalui integrasi antar aktor untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi warga negara (Nilsson et al., 2017). Keterlibatan dari aktor di berbagai tingkatan diakui secara luas sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan SDGs (Dlouhá & Pospíšilová, 2018). Pemerintah daerah kabupaten Sumenep sebagai aktor utama dalam menunjang kehidupan masyarakat yang lebih terdidik dengan merancang program pendidikan berkelanjutan. Oleh karena itu program pendidikan berkelanjutan dirancang dengan peningkatan literasi masyarakat dan pengentasan buta aksara sesuai dengan indikator yang ada dalam SDGs bidang pendidikan berkualitas.

Tujuan program pemerintah Sumenep ini merupakan penunjang bagi kehidupan masa depan dan kehidupan saat ini yang sedang dijalani oleh masyarakat. Program yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumenep dalam pengentasan buta aksara bersesuaian dengan indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga, program yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten Sumenep memiliki prospek yang lebih positif.

Bahkan program ini sesuai dengan amanat undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang jaminan hidup cerdas bagi bangsa sebagaimana disebutkan sebelumnya. Melalui pengentasan buta aksara ini, masyarakat di kabupaten Sumenep diharapkan memiliki peluang untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri dengan teknik membaca atau menulis. Namun tentunya sepaik terjang pemerintah kabupaten Sumenep dalam menerapkan kebijakannya di bidang pendidikan tidak serta-merta berjalan lurus dan tanpa kerja keras. Tentu ada langkah-langkah yang dilakukan guna mencapai target yang direncanakan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dikembangkan perspektif SDGs dengan mengacu pada tujuan keempat: meningkatkan pendidikan bermutu dan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif secara merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (Said, 2016, p. 65). Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan tinggi di semua jenjang. Termasuk pendidikan teknis dan kejuruan, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berfungsi dan berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial. Tujuan dasar keempat SDGs pada hakikatnya keterjaminan dalam bidang pendidikan sebagai bekal untuk kehidupan di masa depan, ini yang akan menjadi indikator perkembangan-kemajuannya.



Selain itu, dalam meningkatkan pendidikan bermutu, program SDGs ini mencakup empat tujuan dasar sebagai lanjutan dari penyediaan pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup. Sutopo (2014, p.10) memerinci empat tujuan dasar di bidang pendidikan yaitu: *pertama*, menaikkan sebanyak x% proporsi anak-anak yang dapat mengakses pendidikan pra-dasar. *Kedua*, memastikan setiap anak, apapun situasinya, menyelesaikan pendidikan dasar mampu membaca, menulis, dan berhitung cukup baik untuk memenuhi standar pembelajaran minimum. *Ketiga*, memastikan setiap anak, apapun situasinya, memiliki akses terhadap pendidikan menengah dan menaikkan proporsi remaja yang mencapai hasil pembelajaran yang diakui dan terukur hingga x%. *Keempat*, menaikkan jumlah anak muda serta perempuan dan laki-laki dewasa yang memiliki keahlian, termasuk keahlian teknis dan keahlian kejuruan yang dibutuhkan di dunia kerja sebanyak x%.

Peningkatan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumenep ini pada dasarnya mengacu pada komitmen negara Indonesia yang terus menerapkan dan meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan khususnya di bidang pendidikan. Selain itu, kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep ini merupakan bagian dari program SDGs yang memiliki tujuan untuk menjamin pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang literasi yaitu pengentasan buta aksara bagi masyarakat dewasa yang kurang mampu.

Untuk mengetahui indikator dari program SDGs, dalam penelitian ini akan dieksplor dan dianalisis secara ilmiah tentang model dan strategi program pengentasan buta aksara yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumenep dan korelasinya dengan program SDGs sebagai bentuk implementasi dan ketentuan berhasil atau tidaknya program tersebut.

Penelitian yang secara spesifik menjelaskan tentang kebijakan pengentasan buta aksara dan peningkatan literasi warga negara belum peneliti jumpai. Pada umumnya penelitian bidang pendidikan yang mempromosikan agenda SDGs berkaitan dengan kontribusi perpustakaan dalam memfasilitasi agenda SDGs (Anasi et al., 2018), reformasi sistem pendidikan (Afridi, 2017), kesenjangan gender dalam mencapai pendidikan berkelanjutan (Pleśniarska, 2019), pendidikan berkelanjutan di perguruan tinggi (Montenegro de Lima et al., 2020). Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk menjelaskan kebijakan pemerintah daerah tentang peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan (SDGs-4) pada indikator pengentasan buta aksara dan peningkatan literasi warga negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu konsep yang digunakan dalam perencanaan sebuah penelitian ilmiah. Tujuan penggunaan metode penelitian yaitu untuk menjamin kredibilitas keilmiah sebuah penelitian tentang sebuah data yang dihasilkan dari subjek. Hal ini yang akan menjadi penentu keilmiah sebuah penelitian. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011, p.6), pendekatan ini digunakan dalam beberapa penelitian karena berusaha untuk memahami tentang dunia subjek yang di antaranya termasuk pelaku, pandangan, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara natural atau alami.

Kasiram (2010, p.176) memperkuat pernyataan Moleong – tentang penelitian kualitatif – bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami, mencari makna di balik data, dan berusaha menemukan kebenaran di dalam data. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan informasi yang validasinya bisa dipercaya dan keilmiahannya dapat dipertanggungjawabkan karena teknik yang digunakan sesuai dengan teknik ilmiah-logis dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Dengan kata lain, alasan pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena data-data yang dikumpulkan berupa informasi yang sifatnya murni dari aktivitas yang dilakukan oleh subjek, khususnya aktivitas pemerintah kabupaten Sumenep terkait dengan kebijakannya dalam mengentaskan buta aksara dengan program literasi bagi masyarakat. Kekuatan utama dalam pendekatan penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan dalam bentuk deskriptif. Yang mana tujuan penggunaan pendekatan deskriptif ini untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.



Sukmadinata (2012, p.60) menjabarkan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya bersifat induktif, yang mana peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan secara saksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang rinci disertai catatan-catatan dari hasil analisis dokumen yang didapatkan.

Sedangkan jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pengembangan (*developmental research*) dengan rancangan fenomenologi. Istilah fenomenologi mengacu pada studi tentang fenomena, yaitu segala sesuai yang muncul pada seseorang (masyarakat) dalam pengalaman sadar mereka (Gill, 2020). *Developmental research* bertujuan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk dengan menyediakan gambaran umum tentang definisi dan cakupannya (Richey & Klein, 2014).

Melalui *developmental research*, penelitian ini akan memilih model kebijakan pemerintah dalam mengentaskan buta aksara di kabupaten Sumenep. Dengan menggunakan *developmental research* akan diketahui tentang indikator yang menjadi tujuan kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep di bidang pendidikan dengan evaluasi-evaluasi yang sifatnya konstruktif. Dengan demikian, teknik ini akan memberikan hasil akhir dari kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep dalam memberantas buta aksara dalam merealisasikan program SDGs di bidang pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sumenep telah membuat suatu kebijakan dalam strategi pembangunan di bidang pendidikan yaitu melalui strategi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dengan arah kebijakan: *pertama*, melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas (Wajar Dikdas 9 tahun). *Kedua*, peningkatan integritas dan kualitas hasil pendidikan. *Ketiga*, peningkatan tenaga pendidikan (RPJMD Kabupaten Sumenep, 2016-2021).

Perlu diketahui bahwa sebagai sebuah program lanjutan dari MDGs, program SDGs lebih memfokuskan pada kolaborasi programnya dengan objek yang menjadi sasaran. Namun, disadari atau tidak, dalam perancangan SDGs ada beberapa tantangan seperti terdapat beberapa target MDGs yang belum bisa dicapai dan tentunya hal ini yang perlu menjadi tugas dalam program SDGs untuk ditindaklanjuti (Fehling et al., 2013). Segala yang menjadi target, tujuan, dan indikator dalam dokumen SDGs tentu harus mempertimbangkan perubahan situasi global yang sedang terjadi dengan merumuskan kembali cara implementasi yang lebih strategis (Lane, 2017)

Penurunan angka buta aksara memang benar-benar menjadi suatu target yang bisa dikatakan berhasil di kabupaten Sumenep dengan anggaran dana sekitar satu miliar rupiah sebagai dana pokok. Sejak tahun 2010 hingga 2016, penurunan buta aksara mencapai 60%. Pada tahun 2010 masih terdapat sekitar 134.540 jiwa atau 12,9% dari jumlah 1.042.312 jiwa yang tidak bisa baca. Hingga pada tahun 2016, angka buta aksara turun menjadi sekitar 60% (RadarMadura.JawaPos.2017/09/08)(JPRM: 2017).

Sebagaimana dijelaskan oleh Lisbet (2016) bahwa sepanjang tahun 2016, sejumlah perkembangan terjadi dalam hal upaya nasional untuk mencapai SDGs. Hal ini mulai dari ada komitmen pemerintah untuk menetapkan sebuah payung hukum yang jelas untuk mewujudkan SDGs hingga sejumlah komitmen lainnya dari masyarakat sipil dan juga pemerintah daerah yang perlu mendapatkan tempatnya dalam sejarah perkembangan SDGs di Indonesia.

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ada visi dan prinsip-prinsip utama. Langkah kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep tak melesat dari visi dan prinsip yang dijadikan dasar dalam program SDGs. Komitmen program SDGs memperkuat terhadap tujuan pembangunan milenium (MDGs) atau dikenal juga sebagai MDGs plus, serta berlandaskan agenda 21 yang menekankan visi dan konsep pembangunan berkelanjutan. Sedangkan SDGs menekankan pada visi bersama (*shared visions*) yang menjadi acuannya.

Alisjahbana dan Murniningtyas (2018) menjabarkan tentang visi bersama, yaitu: *pertama*, komprehensif dengan berlandaskan pada tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, dan tata kelola (*government*). *Kedua*, tematik yaitu terdiri dari 17 tujuan (*goals*). Holistik dan terintegrasi, 17 tujuan tidak berdiri sendiri, namun saling terkait dan terintegrasi. Inklusif, tidak ada satu pihak

pun yang tertinggal (*no one left behind*). *Ketiga*, kolaborasi (*partnership*), membutuhkan kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan, baik dengan pemerintah, dunia usaha, LSM, universitas, dan masyarakat. Sedangkan komponen utama dari SDGs yaitu terdiri dari sepuluh (10) yang salah satunya berupa pembangunan manusia utamanya terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.

Sebagaimana umumnya telah diketahui bahwa SDGs memiliki lima fondasi yang menjadi landasannya. Lima fondasi tersebut yaitu meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang kemudian dibagi lagi menjadi tujuh belas tujuan secara global. Tujuh belas tujuan secara global ini berusaha diaplikasikan dan dikolaborasikan dengan program pemerintahan sebagai kebijakannya. Pemerintah kabupaten Sumenep telah melakukan terobosan dalam merealisasikan programnya, yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui pengentasan buta aksara bagi masyarakat Sumenep yang menjadi target dan indikator kemajuan pembangunannya.

Kendala dan Solusi

Ada beberapa hambatan yang perlu disadari dalam program memajukan masyarakat di bidang pendidikan dan kaitannya dengan program SDGs. Pribadi (2017) memberikan gambaran di lingkungan pemerintahan Papua bahwa permasalahan pendidikan yang ada di Papua bukanlah semata mengenai kurangnya infrastruktur yang ada di sana, melainkan kualitas pendidikan yang ada di Papua seperti kualitas guru dan peserta didik masih belum mencapai tingkat yang berkualitas. Dalam hal ini, SDGs menerapkan program pendidikan berkualitas, yang mana untuk menjalankan program ini pemerintah Papua melakukan kerjasama dengan organisasi lokal maupun internasional yang mana ada beberapa program yang dijalankan guna mencapai pendidikan yang berkualitas, program tersebut yaitu Program Sekolah Satu Atap (SATAP), program sarjana mendidik di daerah terdepan-terluar-tertinggal, program baca, tulis, dan hitung.

Selain itu, penelitian tentang pendidikan bermutu dengan program MDGs sebagai induk SDGs yang dilakukan oleh Sulistyastuti (2007) menyimpulkan empat hal sebagaimana berikut: *pertama*, pemerintah belum memiliki *political will* terhadap tujuan dari pembangunan melenium sebagai prioritas dalam pembangunan. Hal ini terbukti bahwa alokasi anggaran untuk bidang pendidikan masih rendah. Akibat kemauan politik pemerintah yang rendah ini, maka kebijakan di bidang pendidikan cenderung bersifat pragmatis.

Kedua, komitmen pemerintah sebagaimana tertuang pada pasal 31 UUD 1945 dan pasal 34 UU No. 20/2003 ternyata mengalami "pengingkaran". Pemerintah seperti ingin melimpahkan sebagian tanggungjawab pendidikan dasar 9 tahun yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat justru kepada masyarakat sendiri. Melemahnya komitmen pemerintah terhadap kewajiban penyelenggaraan pendidikan dasar ini semakin tampak dalam pasal 46 ayat 1 UU No 20/2003, yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ketiga, otonomi daerah justru semakin mempersulit pencapaian MDGs karena lemahnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. *Keempat*, dukungan lembaga internasional terhadap pencapaian MDGs juga masih jauh dari harapan. Yang semestinya dunia internasional memberikan dukungan besar karena masalah pendidikan masih merupakan masalah kronis di Negara berkembang.

Tak jauh berbeda dengan kendala yang menghambat program pemerintahan beberapa daerah sebagaimana dijelaskan tersebut dalam memajukan pendidikan, pemerintah kabupaten Sumenep pun mengalami hal serupa yaitu minat masyarakat masih kurang tinggi dalam belajar. Namun, untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah kabupaten Sumenep memanfaatkan tokoh masyarakat yang sudah bisa membaca dan berpendidikan untuk melakukan persuasi agar minat belajar masyarakat tumbuh. Hal ini berhasil dilakukan karena masyarakat tentu merasa enggan jika diminta untuk belajar oleh orang yang dituakan dan memiliki pengetahuan yang lebih luas dibanding mereka.

Akan tetapi, disadari atau tidak bahwa pendidikan lebih merupakan alat untuk memenuhi kepentingan pemerintah, yaitu untuk menggiring rakyat dan umat kepada tujuan politik yang diinginkan secara teoritis tidak salah jika pemerintah menginginkan agar produk lulusan lembaga pendidikan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Namun pada saat yang sama pemerintah juga memberikan kebebasan kepada dunia pendidikan untuk menentukan arahnya dengan tetap memperoleh bantuan, dukungan, dan fasilitas dari pemerintah.

Hal ini senada dengan penelitian di bidang pendidikan yang dilakukan Muzammil (2016) yang menjelaskan bahwa Dari sejak zaman pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan (Orde Lama), Orde Baru, hingga Era Reformasi, pendidikan (Islam) masih berada dalam posisi yang secara umum belum berpihak pada pemberdayaan umat. Tetapi secara perlahan, arah kebijakan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.

Terlebih di era milenial saat ini, masyarakat diberi media yang bisa menjadi sarana untuk belajar dan menentukan sendiri minatnya, tentunya ada dukungan dari pemerintah. Secara politis, pemerintah Sumenep juga memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki prestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yang kemudian hasil lulusannya digunakan untuk mengembangkan dan memajukan masyarakat daerah.

Maka dari itu, untuk mencapai target sebagaimana yang dicanangkan dalam program SDGs, pemerintah kabupaten Sumenep telah melakukan upaya-upaya yang perlu dijadikan sebagai langkah kebijakannya dalam mengentaskan buta aksara. Salah satunya dengan memanfaatkan orang terdidik di tiap desa untuk mengajar. Hal ini berjalan sesuai dengan rencana yang dicanangkan, sehingga dana yang digelontorkan tidak sia-sia. Indikator-indikator pembangunan jangka panjang cukup terlihat dari pengurangan angka buta aksara di kabupaten Sumenep sejak tahun 2016 hingga mencapai 60% sebagaimana diberitakan oleh Jawa Pos Radar Madura.

Kerjasama Birokrasi

Kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep telah mengambil langkah yang cukup strategis, selain memanfaatkan guru lokal yang mampu untuk mengajar baca-tulis, pemerintah kabupaten Sumenep juga menggandeng birokrasi desa guna merealisasikan komitmennya dalam mengentaskan buta aksara bagi masyarakat dewasa kurang mampu. Hal ini menjadi indikator utama dalam menyukseskan program SDGs di bidang pendidikan. Dengan kata lain, dalam rangka untuk mencapai pendidikan yang bermutu, pemerintah kabupaten Sumenep perlu melakukan kerjasama dengan birokrasi.

Hal ini sesuai dengan temuan Solichin (2015) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan memang dibutuhkan agar mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responsibilitas harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan yang prima terutama untuk merespons kepentingan publik. Lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis ketimbang dijadikan sasaran eksploitasi dan kepentingan politik etis semata yang menegasikan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri.

Peran birokrasi di lembaga sekolah pada akhirnya menjadi puncak model implementasi kebijakan pada satuan dan jenjang pendidikan. Di sini diperlukan adanya pembaharuan manajemen pada satuan dan jenjang pendidikan tersebut. Proses pembaharuan atau inovasi manajemen menjadi suatu keniscayaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Problem-problem tersebut berupa usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektivitas serta relevansi pendidikan. Tujuannya agar penyebaran ide-ide inovasi yang dilakukan bisa diadopsi, dimanfaatkan, dan didesiminasikan untuk perbaikan dan pemecahan problematika pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan data-data tersebut, pengentasan buta aksara di kabupaten Sumenep bisa dikatakan telah mencapai target. Indikator-indikator pembangunan berkelanjutan (SDGs) berhasil diterapkan secara terstruktur dan sesuai target. Hal ini terbukti dengan adanya kolaborasi pemerintah Sumenep dengan perangkat desa dalam merealisasikan kebijakannya untuk mengentaskan buta aksara. Kesesuaian kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep di bidang

pendidikan dengan program SDGs menjadi indikator keberhasilannya dalam pembangunan masyarakat agar memiliki pendidikan yang bermutu.

Dari sekitar 1.042.312 jiwa keseluruhan jumlah penduduk masyarakat Sumenep, ada sekitar 134.540 jiwa yang belum bisa membaca dan menulis. Pada tahun 2016, angka ini berkurang menjadi 53.816 jiwa yang tidak bisa membaca. Dengan kata lain pada tahun 2016, masyarakat Sumenep ada sekitar 80.724 jiwa yang sudah bisa membaca dan menulis. Program pengentasan buta aksara di kabupaten Sumenep telah dimulai sejak tahun 2010 dan indikator-indikatornya mulai tampak pada tahun 2016.

Pada laman website Pemerintah Kabupaten Sumenep (sumenepkab.go.id: 05 Desember 2017) diberitakan bahwa tahun 2018, pemerintah kabupaten Sumenep menganggarkan sekitar 700 juta rupiah di bidang pendidikan. Anggaran ini digunakan sebagai upaya serius pemerintah kabupaten Sumenep melalui dinas pendidikan dalam rangka untuk memberantas buta aksara. Hal ini juga disingkronkan dengan dana desa (DD) melalui Gerakan Pemberantasan Buta Aksara (GPBA). Target pencapaian tersebut yaitu pada tahun 2019. Kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep di bidang pendidikan yaitu mengentaskan buta aksara merupakan suatu komitmen yang memiliki hubungan erat dengan program SDGs. Namun, untuk hal ini belum ada data statistik yang menjadi indikatornya pada tahun 2019.

SIMPULAN

Sebagai kabupaten yang memiliki komitmen yang tinggi di bidang pendidikan, pemerintah kabupaten Sumenep telah memberlakukan suatu kebijakan di bidang pendidikan, yaitu pengentasan buta aksara bagi masyarakat dewasa kurang mampu yang dimulai sejak tahun 2010 dan pada tahun 2016 indikator pencapaian targetnya pun terlihat. Kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep ini bersesuaian dengan program SDGs poin keempat tentang meningkatkan pendidikan bermutu. Dalam menerapkan kebijakannya di bidang pendidikan, pemerintah kabupaten Sumenep menggandeng birokrasi desa guna merealisasikan program melek aksara. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan perangkat desa dan masyarakat terdidik untuk mengajar. Cara ini merupakan langkah strategis dalam menjalin kerjasama guna menghasilkan indikator yang sesuai dengan target yang ingin dicapai, yaitu masyarakat memiliki pendidikan yang bermutu dengan bekal mampu membaca dan menulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridi, M. (2017). PPPs in global education policy: Looking at the case of the Egyptian Education Initiative. *Advances in Education in Diverse Communities: Research, Policy and Praxis*, 12, 165–188. <https://doi.org/10.1108/S1479-358X20140000012009>
- Alisjahbana, A.S., & Murningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target, dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Anasi, S. N., Ukangwa, C. C., & Fagbe, A. (2018). University libraries-bridging digital gaps and accelerating the achievement of sustainable development goals through information and communication technologies. *World Journal of Science, Technology and Sustainable Development*, 15(1), 13–25. <https://doi.org/10.1108/wjstd-11-2016-0059>
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dlouhá, J., & Pospíšilová, M. (2018). Education for Sustainable Development Goals in public debate: The importance of participatory research in reflecting and supporting the consultation process in developing a vision for Czech education. *Journal of Cleaner Production*, 172, 4314–4327. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.145>
- Fehling, M., Nelson, B. D., & Venkatapuram, S. (2013). Limitations of the Millennium Development Goals: A literature review. *Global Public Health*, 8(10), 1109–1122. <https://doi.org/10.1080/17441692.2013.845676>
- Gill, M. J. (2020). Phenomenology as qualitative methodology. *Qualitative Analysis: Eight Approaches*, 73–94.
- Kasirim, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Lane, A. (2017). Open Education and the Sustainable Development Goals: Making Change Happen. *Journal of Learning for Development*, 4(3), 275–286.
- Lisbet. (2016). *Parlemen dan SDGs: Memperkuat tata Kelola*. Jakarta: Panitia SDGs.



- Moeleng, L.J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muzammil, A. (2016). Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan Orde Lama sampai Orde Baru. *Potensi: Jurnal Kependidikan Islam*. Vol. II. No.2.
- Montenegro de Lima, C. R., Coelho Soares, T., Andrade de Lima, M., Oliveira Veras, M., & Andrade Guerra, J. B. S. O. de A. (2020). Sustainability funding in higher education: a literature-based review. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 21(3), 441–464. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2019-0229>
- Nilsson, M., Griggs, D., Visbeck, M., Ringler, C., & McCollum, D. (2017). Introduction: A framework for understanding sustainable development goal interactions. In *Development Success: Statecraft in the South* (pp. 1–29). <https://doi.org/10.1057/9780230223073>
- Pribadi, R.E., (2017). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Papua. *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. V, No.3
- Pleśniarska, A. (2019). Monitoring progress in “quality education” in the European Union – strategic framework and goals. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 20(7), 1125–1142. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2018-0171>
- Rasaili, W., Dafik, H.R., & Prayitno, H. (2020). On strengthening the local politics to the realization of rural quality education sustainable development goals. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012148>
- Richey, R. C., & Klein, J. D. (2014). Design and Development Research. *Handbook of Research on Educational Communications and Technology: Fourth Edition*, 1–1005. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5>
- RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 (2016). Peraturan Daerah Nomo 6 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Bappeda Kabupaten Sumenep. diakses di bappeda.sumenepkab.go.id > RPJMD2016-2018, pada 19 Desember 2020
- Radarmadura.JawaPos (2017). Gelontorkan uang miliaran rupiah berantas buta aksara. RMJP. Diakses di <https://radarmadura.jawapos.com/read/2017/09/08/12330/gelontorkan-uang-miliaran-rupiah-berantas-buta-aksara>, pada 19 Desember 2020
- Ali, S.. (2016). *Kajian Indikator Lintas Sektor: Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia
- Mujiyanto, S.. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*. Vol. VI, No. 2
- Sukmadinata, N.S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian memberikan deskripsi, eksplanasi, prediksi, inovasi dan juga dasar dasar teoritis bagi pengembangan pendidikan*. Bandung: Rosdakarya
- Sulistyastuti, D.R., (2007). Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia. *Jurnal kependudukan Indonesia*. II(2), 100-110.
- Sutopo, A. (2014). *Kajian Indikator Lintas Sektor: Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Statistik Indonesia.
- Undang-Undang Negara Indonesia (NKRI) Nomor 20 Tahun 2003.